

## **Raih Skor 99,1 Berpredikat Istimewa, Pemkot Kediri Terima Penghargaan Indeks Reformasi Hukum 2026**

**SURABAYA** – Pemerintah Kota Kediri kembali mengukir prestasi dalam bidang tata kelola hukum daerah. Pemkot Kediri sukses meraih skor tertinggi se-wilayah hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur pada penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2026.

Dengan perolehan nilai mencapai 99,1 dan berpredikat Istimewa, Kota Kediri



menempati posisi puncak penilaian IRH 2026 bersanding dengan Pemerintah Kota Malang. Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian Upacara Peringatan Hari Pengayoman yang bertempat di Halaman Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, Surabaya, Rabu (19/8/2026).

Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Plt. Kepala Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur, Raden Fadjar Widjanarko, S.E., M.M., dan diterima oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kediri, Anita Puji Lestari, S.H., M.H., yang hadir mewakili Pemerintah Kota Kediri.

Selain penyerahan piagam IRH, forum peringatan Hari Pengayoman tersebut juga dirangkaikan dengan penganugerahan predikat Terbaik Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)/Perpustakaan Hukum di wilayah Kanwil Kemenkum Jatim. Kendati berhasil memuncaki penilaian IRH, pada kategori pengelolaan JDIH kali ini Kota Kediri belum berhasil mengumpulkan nilai maksimal dan terus melakukan evaluasi serta pembenahan ke depan.



Ditemui usai kegiatan, Kabag Hukum Setda Kota Kediri, Anita Puji Lestari, S.H., M.H., menyampaikan rasa syukur atas pencapaian pada sektor reformasi hukum sekaligus menjadikannya sebagai momentum evaluasi secara menyeluruh.

"Predikat Istimewa pada IRH 2026 ini merupakan bukti komitmen Pemkot Kediri dalam menghadirkan regulasi yang akuntabel dan harmonis. Terkait pengelolaan JDIH yang belum maksimal, hal ini menjadi pemicu dan bahan evaluasi bagi kami untuk terus membenahi serta meningkatkan kualitas layanan dokumentasi dan informasi hukum digital agar semakin optimal ke depannya," jelas Anita.

Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) merupakan indikator utama pengukur keberhasilan reformasi birokrasi pada area penataan peraturan perundang-undangan di tingkat pemerintah daerah. Perolehan skor 99,1 ini mempertegas langkah nyata Pemkot Kediri dalam memperkuat kepastian hukum dan tata kelola pemerintahan yang responsif.